

STANDARISASI PENYELENGGARAAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BEKASI: EVALUASI KONDISI EKSISTING DAN ARAHAN STRATEGI

Rd. Tati Kurniati¹, Cahya Nur Hidayat², Fauziah³
Corresponding author : rdtatik.jurnal@gmail.com

ABSTRAK

INFO NASKAH

Riwayat Naskah :

Diterima April 2026

Diterima hasil revisi Mei 2026

Terbit Juni 2026

Kata Kunci :

atraksi
aksesibilitas
amenitas
ancillary
destinasi wisata

Standarisasi penyelenggaraan destinasi wisata merupakan upaya strategis dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi eksisting destinasi wisata di Kabupaten Bekasi berdasarkan komponen atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan *ancillary*, serta merumuskan arahan standarisasi berdasarkan hasil analisis SWOT. Pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih 18 objek wisata dari enam kategori (bahari, alam, industri, rekreasi, kuliner, dan *heritage*). Penelitian dilaksanakan pada Januari–Mei 2025 melalui observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel destinasi wisata belum sepenuhnya memenuhi standar yang diamanatkan oleh Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021. Kelemahan terbesar ditemukan pada komponen amenitas (ketiadaan fasilitas difabel, sanitasi tidak layak) dan *ancillary* (absennya SOP pengelolaan dan pemandu berlisensi). Analisis SWOT menghasilkan strategi bertahap (jangka pendek, menengah, dan panjang) untuk masing-masing kategori wisata. Standarisasi yang konsisten diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik wisata, sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang pada tahun 2024 mencapai 3.323.414 orang.

Kata Kunci: atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary, destinasi wisata

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Pemerintah RI, 2009). Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 adalah terwujudnya pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan (Pemkab Bekasi, 2018).

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, jumlah kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 mencapai 3.323.414 wisatawan. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi, (email : rdtatik.jurnal@gmail.com)

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi, (email : cahyonur.jurnal@gmail.com)

³Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi

(KPPK) menetapkan enam jenis wisata, yakni wisata bahari, alam, industri, rekreasi, kuliner, dan *heritage* (Pemkab Bekasi, 2023).

Namun, pertumbuhan kunjungan wisatawan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan yang memadai. Hingga saat ini masih terdapat disparitas layanan dan fasilitas antardestinasi wisata di Kabupaten Bekasi, yang antara lain disebabkan belum tersedianya standar yang mengikat dalam penyelenggaraan destinasi wisata (Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, 2021). Kondisi ini sejalan dengan temuan Adebayo dan Iweka (2014) yang menekankan bahwa infrastruktur pariwisata yang tidak terstandarisasi berpotensi menurunkan kepuasan wisatawan dan menghambat keberlanjutan destinasi.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang telah menyusun standar, indikator, dan bukti pendukung pengelolaan destinasi secara komprehensif (Kemenparekraf, 2021). Regulasi tersebut menjadi dasar normatif mengapa standarisasi destinasi wisata di Kabupaten Bekasi perlu segera diwujudkan. Semakin baik kualitas destinasi wisata, semakin besar daya tariknya bagi wisatawan (Cooper et al., 1995; Suwanto, 1997). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi kondisi eksisting destinasi wisata berdasarkan komponen 4A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary*); (2) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing destinasi melalui analisis SWOT; dan (3) merumuskan arahan standarisasi yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Standarisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masa kini dan masa depan (Pemerintah RI, 2014). Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Dalam konteks pariwisata, Hamzana (2017) menegaskan bahwa standarisasi pelayanan pariwisata berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu yang melindungi hak wisatawan sekaligus mendorong profesionalisme pengelola destinasi. Adapun persyaratan dasar pengembangan standar mencakup: (a) standar harus realistis dan dapat dicapai; (b) standar harus dapat diterima dan berguna bagi pengguna maupun pengambil keputusan; dan (c) standar harus didasarkan pada analisis yang sesuai dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh (Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, 2021).

2.2. Komponen Destinasi Wisata (4A)

Cooper et al. (1995) mengklasifikasikan komponen destinasi wisata ke dalam empat elemen utama yang dikenal sebagai model 4A, yaitu: (1) *Attraction* (atraksi), yakni segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan; (2) *Accessibility* (aksesibilitas), yaitu kemudahan pencapaian destinasi; (3) *Amenities* (amenitas), berupa fasilitas pendukung kenyamanan wisatawan; dan (4) *Ancillary Services*, yaitu layanan pendukung seperti lembaga pengelola, regulasi, dan sumber daya manusia. Nasrullah et al. (2023) menambahkan bahwa keempat komponen ini harus direncanakan secara terintegrasi untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

2.3. Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCAD) pada tahun 1987, yang menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. WTO (1993) merumuskan empat aspek keberlanjutan pariwisata: (a) ekologi, yakni pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat; (b) sosial, yaitu penduduk lokal mampu menyerap aktivitas pariwisata tanpa konflik sosial; (c) budaya, yakni masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan; dan (d) ekonomi, yaitu keuntungan pariwisata meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hughes, 1995).

Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang mencakup standar, indikator terukur, dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi (Kemenparekraf, 2021).

2.4. Analisis SWOT dalam Perencanaan Pariwisata

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan metode evaluasi strategis yang secara luas digunakan dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata. Noer (2011) menekankan bahwa analisis SWOT memungkinkan identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi daya saing suatu destinasi. Pendekatan ini membantu perencana merumuskan strategi yang bersifat realistis dan kontekstual sesuai kondisi lokal destinasi wisata (Agustino, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi faktual yang terjadi melalui observasi lapangan, deskripsi dokumen, dan wawancara mendalam dengan informan kunci (Sugiyono, 2014). Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2025 di wilayah Kabupaten Bekasi.

Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memilih individu atau kasus berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan terhadap: (1) pengelola destinasi wisata; (2) pelaku usaha kepariwisataan (pedagang, penyedia jasa transportasi lokal); (3) wisatawan; (4) masyarakat dan pemerintah desa/kecamatan di lokasi destinasi; serta (5) POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

Penentuan sampel lokasi wisata didasarkan pada empat kriteria: (1) keterwakilan jenis wisata; (2) aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya penelitian; (3) popularitas dan dampak ekonomi destinasi; serta (4) keunikan dan potensi pengembangan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kondisi eksisting berdasarkan komponen 4A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary*) pada setiap sampel, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman masing-masing destinasi, sehingga diperoleh arahan strategi standarisasi yang kontekstual. Adapun sampel lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Lokasi Objek Penelitian

No	Jenis Wisata	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
1	Wisata Bahari	Pantai Muara Beting Bendera Pantai Mekar	Kec. Muaragembong
2	Wisata Alam	Situ Cibeurem Taman Pelangi Samba	Situ Burangkeng Danau Arjuna Kec. Tambun Selatan Kec. Pebayuran Kec. Sukatani

3	Wisata Industri	Hyundai Motor Mfg Indonesia PT. Mengniu Dairy Indonesia PT. Diamond Cold Storage PT. Suzuki Indomobil Motor	Kec. Bojongmangu Kec. Serang Baru Kec. Cikarang Barat Kec. Cikarang Pusat
4	Wisata Rekreasi	GoWet Water Park	Kec. Tambun Selatan
5	Wisata Kuliner	City Walk Lippo Cikarang Pasar Bersih Cikarang Baru	Kec. Cikarang Selatan Kec. Cikarang Utara
6	Wisata Heritage	Kampung Batik Bekasi Gedung Juang Rumah Tradisional Saung Ranggong Makam KH Noer Ali	Kabupaten Bekasi Kec. Tambun Selatan Kec. Cikarang Barat Kec. Babelan

Sumber: Hasil Rumusan Tim, 2025

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Eksisting Destinasi Wisata dan Pemenuhan Standar

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan terhadap 18 objek wisata pada enam kategori, diperoleh gambaran kondisi pemenuhan standar komponen 4A yang disajikan pada Tabel 2. Secara umum, seluruh sampel destinasi wisata di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memenuhi standar yang diamanatkan oleh Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021. Kesenjangan terbesar ditemukan pada komponen amenitas dan *ancillary*, khususnya menyangkut ketiadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, sistem sanitasi yang tidak layak, tidak adanya SOP pengelolaan, dan absennya pemandu wisata berlisensi.

Tabel 2. Kondisi Pemenuhan Standar Komponen 4A pada Sampel Destinasi Wisata

Jenis Wisata	Kondisi Pemenuhan Standar (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary)
Wisata Bahari	Atraksi: ekosistem mangrove alami tersedia; tracking belum ada jalur formal Aksesibilitas: jalan darat rusak; transportasi air belum ada Amenitas: tidak ada toilet layak, P3K, atau menara pengawas Ancillary: tidak ada SOP, pengelola, atau sistem retribusi
Wisata Alam	Atraksi: pemandangan situ/danau tersedia; program edukasi belum ada Aksesibilitas: jalan menuju lokasi sebagian baik, sebagian belum beraspal Amenitas: parkir tidak teratur; tempat sampah tidak memadai; tidak ada peta denah Ancillary: POKDARWIS ada namun belum tersertifikasi; pengelolaan belum profesional
Wisata Industri	Atraksi: proses produksi berstandar tinggi; corporate museum pada 2 perusahaan Aksesibilitas: akses internal perusahaan baik; zona sirkulasi wisatawan belum ada Amenitas: fasilitas K3 lengkap; ruang tunggu wisatawan belum tersedia Ancillary: SOP kunjungan wisata belum tersusun; materi edukasi belum ada
Wisata Rekreasi	Atraksi: wahana air lengkap; event berkala belum terjadwal Aksesibilitas: akses jalan baik; belum ada jalur difabel Amenitas: fasilitas umum memadai; area difabel belum ada; pengelolaan limbah belum optimal Ancillary: pengelolaan profesional; kerjasama sekolah belum formal
Wisata Kuliner	Atraksi: ragam kuliner tersedia; kuliner khas Bekasi belum menonjol Aksesibilitas: lokasi strategis; parkir terbatas di Pasar Bersih Amenitas: sanitasi tidak memenuhi standar hygiene; sertifikasi pangan belum ada Ancillary: pengelolaan PKL temporal; tidak ada regulasi retribusi formal
Wisata Heritage	Atraksi: nilai sejarah tinggi; materi edukasi digital belum ada Aksesibilitas: lokasi dapat dijangkau; tidak ada petunjuk arah yang memadai Amenitas:

kondisi bangunan sebagian memerlukan restorasi; tidak ada pusat informasi | Ancillary: tidak ada pemandu berlisensi; regulasi cagar budaya belum diterapkan konsisten

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2025

4.2. Analisis SWOT dan Strategi Standarisasi Per Kategori Wisata

Temuan identifikasi kondisi eksisting selanjutnya dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menghasilkan strategi standarisasi yang sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing kategori wisata. Pendekatan ini sejalan dengan Noer (2011) dan Agustino (2017) yang menekankan pentingnya kontekstualisasi strategi pengembangan destinasi berdasarkan faktor internal dan eksternal.

a. Wisata Bahari (Pantai Muara Beting, Muara Bendera, Pantai Mekar)

Kekuatan (S)	Keunikan ekosistem mangrove; panorama pesisir alami; potensi birdwatching dan tracking mangrove; dukungan komunitas nelayan lokal.
Kelemahan (W)	Aksesibilitas jalan darat rusak dan belum memadai; tidak tersedia toilet dan fasilitas sanitasi yang layak; tidak ada lifeguard atau menara pengawas; sinyal telekomunikasi lemah; belum ada pengelola resmi.
Peluang (O)	Permintaan ekowisata dan wisata alam pesisir meningkat; peluang CSR industri di Kab. Bekasi; integrasi dengan program konservasi mangrove nasional; pengembangan shuttle boat.
Ancaman (T)	Abrasi dan degradasi mangrove akibat aktivitas manusia; cuaca ekstrem; minimnya regulasi retribusi sehingga pendapatan tidak terkelola; persaingan dengan destinasi bahari lain.
Strategi	Prioritas jangka pendek: perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas sanitasi dasar (MCK). Jangka menengah: pembangunan menara pengawas, jalur tracking kayu, dan pusat informasi mangrove. Jangka panjang: penetapan UPTD pengelola dan integrasi transportasi air.

b. Wisata Alam (Situ Cibeurem, Situ Burangkeng, Taman Pelangi, Danau Arjuna Samba)

Kekuatan (S)	Sumber daya air yang menarik; suasana alami dan hijau; beberapa lokasi sudah dikenal masyarakat sekitar; potensi kegiatan jogging, sepeda, dan water sport terbatas.
Kelemahan (W)	Kondisi kebersihan situ belum terjaga; fasilitas parkir tidak teratur; tidak ada peta wisata atau papan informasi; pengelolaan sampah belum terstruktur; SDM pengelola belum terlatih.
Peluang (O)	Peningkatan tren wisata alam pasca pandemi; program Situ Clean-Up dapat meningkatkan partisipasi wisatawan; kerjasama dengan BBWSCC untuk konservasi dan pengembangan.
Ancaman (T)	Pendangkalan situ akibat sedimentasi; alih fungsi lahan di sekitar kawasan; risiko banjir musiman; potensi konflik kepemilikan lahan.
Strategi	Jangka pendek: penataan parkir, papan informasi, pengelolaan sampah terpilah. Jangka menengah: pengembangan jalur sepeda dan zona edukasi. Jangka panjang: sertifikasi POKDARWIS dan integrasi digital (e-ticketing, peta online).

c. Wisata Industri (HMMI, Mengniu/Yoyic, Diamond Cold Storage, Suzuki Indomobil)

Kekuatan (S)	Fasilitas produksi modern berstandar internasional; sudah memiliki SOP K3 yang ketat; corporate museum pada beberapa perusahaan; menjadi satu-satunya wisata industri di Kab. Bekasi.
Kelemahan (W)	Belum ada paket factory visit yang terstruktur untuk umum/pelajar; materi edukasi belum tersedia; zona sirkulasi pengunjung belum ditetapkan; keterbatasan akses bagi wisatawan individu.
Peluang (O)	Tingginya minat wisata edukasi industri dari sekolah dan kampus; peluang kerjasama dengan Dinas Pendidikan; pengembangan virtual tour sebagai alternatif kunjungan.
Ancaman (T)	Risiko keamanan dan keselamatan di area produksi; regulasi kunjungan tamu yang ketat; resistensi manajemen perusahaan terhadap tamu luar.
Strategi	Jangka pendek: penyusunan SOP kunjungan dan materi edukasi, penetapan zona sirkulasi. Jangka menengah: peluncuran paket factory visit dan virtual tour. Jangka panjang: integrasi dengan platform travel dan program CSR wisata edukasi.

d. Wisata Rekreasi (GoWet Water Park)

Kekuatan (S)	Fasilitas water park yang lengkap dan terawat; sudah memiliki pengelola profesional; sistem tiket dan keamanan yang tertata; lokasi strategis di Tambun Selatan.
Kelemahan (W)	Harga tiket relatif tinggi; belum ada area khusus difabel; pengelolaan limbah air belum optimal; kurang wahana edukasi atau zona interaktif.
Peluang (O)	Pengembangan zona interaktif digital art installation; kerjasama dengan sekolah untuk paket kunjungan outing class; event olahraga dan hiburan berkala.
Ancaman (T)	Persaingan dengan waterpark lain di kawasan Jabodetabek; biaya operasional tinggi; risiko penurunan pengunjung di musim hujan.
Strategi	Jangka pendek: penyediaan fasilitas difabel dan pengelolaan limbah air. Jangka menengah: pengembangan zona edukasi interaktif. Jangka panjang: diversifikasi wahana dan kerjasama event skala regional.

e. Wisata Kuliner (City Walk Lippo Cikarang, Pasar Bersih Cikarang Baru)

Kekuatan (S)	Lokasi City Walk strategis di pusat kota; ragam kuliner tersedia; Pasar Bersih dikenal warga lokal sebagai pusat kuliner terjangkau.
Kelemahan (W)	Pasar Bersih Cikarang Baru hanya berupa PKL temporal tanpa pengelolaan terencana; tidak ada kuliner khas Bekasi yang menonjol; kebersihan dan sanitasi belum memenuhi standar; tidak ada sertifikasi pangan.
Peluang (O)	Pengembangan kampung kuliner tradisional; pelibatan chef lokal untuk mengembangkan hidangan fusion; integrasi dengan program UMKM Dinas Koperasi.

Ancaman (T)	Stigma kebersihan pasar tradisional; persaingan dengan pusat kuliner modern; minimnya promosi kuliner khas Bekasi.
Strategi	Jangka pendek: penataan lokasi PKL, standar kebersihan, dan sertifikasi higiene pangan. Jangka menengah: branding kuliner khas Bekasi dan pembangunan foodcourt tradisional. Jangka panjang: integrasi dengan platform digital dan paket wisata kuliner.

f. Wisata Heritage (Kampung Batik Bekasi, Gedung Juang, Saung Ranggon, Makam KH Noer Ali)

Kekuatan (S)	Nilai sejarah dan budaya tinggi; Gedung Juang dan Saung Ranggon sebagai ikon heritage; potensi wisata edukasi sejarah bagi pelajar; keberadaan komunitas budaya lokal.
Kelemahan (W)	Kampung Batik hanya terdiri dari 1 usaha rumahan; kondisi fisik bangunan heritage beberapa belum terawat; tidak ada pemandu berlisensi; materi edukasi sejarah belum tersedia secara digital.
Peluang (O)	Penggunaan AR/VR dalam konten sejarah; penetapan Gedung Juang sebagai 'Wisata Edukasi Wajib'; pengembangan aplikasi mobile tur virtual; kolaborasi dengan tokoh adat dan komunitas.
Ancaman (T)	Kerusakan bangunan cagar budaya karena kurangnya perawatan; rendahnya minat generasi muda terhadap wisata heritage; risiko komersialisasi berlebihan yang mengurangi nilai keaslian.
Strategi	Jangka pendek: restorasi fisik bangunan (minimal 70% material orisinal) dan penyusunan materi edukasi. Jangka menengah: implementasi AR/VR dan aplikasi mobile. Jangka panjang: sertifikasi pemandu wisata heritage dan penetapan regulasi cagar budaya.

4.3. Kendala dan Tantangan Standarisasi

Berdasarkan analisis SWOT keenam kategori destinasi, terdapat tiga kendala utama yang bersifat lintas sektoral dalam upaya standarisasi penyelenggaraan destinasi wisata di Kabupaten Bekasi.

Pertama, *keterbatasan anggaran dan infrastruktur*. Destinasi wisata di wilayah pesisir, khususnya wisata bahari di Kecamatan Muaragembong, menghadapi kondisi jalan yang rusak dan ketiadaan fasilitas sanitasi dasar, yang memerlukan investasi signifikan dari Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR. Kondisi ini selaras dengan temuan Adebayo dan Iweka (2014) tentang hubungan antara kualitas infrastruktur dan keberlanjutan destinasi.

Kedua, *permasalahan kepemilikan lahan dan tata kelola*. Beberapa destinasi, termasuk Situ Cibeurem dan beberapa lokasi alam, menghadapi ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang menghambat proses perizinan dan pengembangan fisik. Penyelesaian konflik lahan memerlukan koordinasi lintas instansi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan Balai Besar Wilayah Sungai.

Ketiga, *kapasitas sumber daya manusia yang terbatas*. Pengelola destinasi wisata, khususnya pada kategori bahari dan alam, belum memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek hospitality, keselamatan wisata, dan pemasaran digital. Hamzana (2017) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan prasyarat keberhasilan implementasi standarisasi pariwisata. Oleh karena itu, program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur—

meliputi *basic first aid*, pemanduan wisata, manajemen POKDARWIS, dan pemasaran digital—menjadi intervensi yang mendesak.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan identifikasi kondisi eksisting dan analisis SWOT terhadap 18 sampel destinasi wisata di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa: (1) seluruh destinasi sampel belum sepenuhnya memenuhi standar komponen 4A sesuai Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021, dengan kesenjangan terbesar pada komponen amenitas (ketiadaan fasilitas difabel, sanitasi tidak layak) dan *ancillary* (absennya SOP dan pemandu berlisensi); (2) kekuatan terbesar Kabupaten Bekasi terletak pada keragaman atraksi wisata, mulai dari bahari, situ/danau, industri, rekreasi, kuliner, hingga *heritage*; (3) kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur di wilayah pesisir, permasalahan kepemilikan lahan, dan rendahnya kapasitas SDM pengelola; serta (4) strategi standarisasi yang dirumuskan bersifat bertahap—jangka pendek berfokus pada standar minimum yang berdampak langsung bagi wisatawan, jangka menengah pada peningkatan kapasitas pengelola dan digitalisasi layanan, dan jangka panjang pada penguatan kelembagaan dan integrasi ekosistem wisata.

Rekomendasi yang diajukan meliputi: (a) peninjauan kembali pengelompokan jenis wisata dalam Perda Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 67 Tahun 2023, mengingat beberapa destinasi tidak lagi memenuhi klasifikasi yang ditetapkan; (b) penerapan standar minimum yang berdampak signifikan bagi wisatawan secara bertahap sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia; (c) pengkajian pembentukan UPTD sebagai pengelola destinasi wisata yang profesional; (d) penguatan program CSR industri sebagai sumber pendanaan aksesibilitas dan amenitas; serta (e) penetapan Gedung Juang sebagai destinasi 'Wisata Edukasi Wajib' bagi sekolah di Kabupaten Bekasi yang terintegrasi dengan kurikulum sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, A. K., & Iweka, A. C. O. (2014). Optimizing the sustainability of tourism infrastructure in Nigeria through design for deconstruction framework. *American Journal of Tourism Management*, 3(1A), 13–19. <https://doi.org/10.5923/s.tourism.201401.02>
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1995). *Tourism: Principles and practice*. Pitman Publishing.
- Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(2), 1–16.
- Hughes, G. (1995). The cultural construction of sustainable tourism. *Tourism Management*, 16(1), 49–59. [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(94\)00007-6](https://doi.org/10.1016/0261-5177(94)00007-6)
- Kemenparekraf. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Lembaga Penelitian Universitas Pasundan. (2021). *Kajian standarisasi dan SOP pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran*. Universitas Pasundan.
- Nasrullah, Nahrawi, A., Hamid, A., & Tahir, A. (2023). *Perencanaan destinasi pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Noer, M. (2011). Strategi pengembangan obyek wisata alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Sulawesi Tengah*.

- Pemkab Bekasi. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2025. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Pemkab Bekasi. (2023). Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 67 Tahun 2023 tentang KSPK dan KPPK Kabupaten Bekasi Tahun 2023–2025. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suwantoro, G. (1997). Dasar-dasar pariwisata. ANDI.